

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN PAJAK DENGAN INDIKATOR TARIF PAJAK EFEKTIF

(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2011-2012)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

IQBAL NUL HAKIM DARMADI
12030111150019

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Iqbal Nul Hakim Darmadi
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111150019
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Usulan Penelitian : **ANALISIS FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI MANAJEMEN
PAJAK DENGAN INDIKATOR TARIF
PAJAK EFEKTIF STUDI EMPIRIS
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PADA TAHUN 2011-2012**
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Zulaikha, M.Si, Akt

Semarang, 31 Juli 2013

Dosen Pembimbing

(Dr. Hj. Zulaikha, M.Si, Akt.)

NIP. 195805251991032001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Iqbal Nul Hakim Darmadi
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111150019
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Usulan Penelitian : **ANALISIS FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI MANAJEMEN
PAJAK DENGAN INDIKATOR TARIF
PAJAK EFEKTIF STUDI EMPIRIS
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PADA TAHUN 2011-2012**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 17 September 2013

Tim Penguji

1. Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt (.....)

2. Dul Muid, S.E., M. Si., Akt. (.....)

3. Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Iqbal Nul Hakim Darmadi, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Studi Empiris Pada Perusahaan Maufaktur Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 dan 2012”** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan dari orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 31 Juli 2013

Yang Membuat Pernyataan,

(Iqbal Nul Hakim Darmadi)
NIM. 12030111150019

Abstract

This study examines and analyze the effect of firm size, capital structure (leverage), profitabilty, fixed asset intensity, inventory intensity and tax incentive to tax management using effective tax rates as a indicator.

The sample of this study were 73 companies listed in Indonesian Stock exchange for years 2011-2012. Analysis tool used multiple linear regression with t test, F test, and test the coefficient of determination.

The result show that there are negative effect of fixed asset intensity and inventory intensity on tax management. Another result show that there are positive effect of firm size on tax management. Capital structure (leverage), profitability and tax incentive were not shown to affect tax management.

Keywords: tax management, effective tax rates, firm size, capital structure (leverage), profitability, fixed asset intensity, inventory intensity, tax incentive

Abstrak

Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, struktur modal (hutang), profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan dan fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak dengan menggunakan indikator tarif pajak efektif.

Sampel penelitian ini adalah 73 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2011-2012. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak. Hasil lain menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif ukuran perpajakan terhadap manajemen pajak. Struktur modal (hutang), profitabilitas dan fasilitas perpajakan tidak terbukti mempengaruhi manajemen pajak.

Kata kunci: manajemen pajak, tarif pajak efektif, ukuran perusahaan, struktur modal (hutang), profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, fasilitas perpajakan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dengan segala ridho, rahmat, *taufiq* dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Studi Empiris Pada Perusahaan Maufaktur Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 dan 2012**” dapat selesai tepat waktu dan berjalan sesuai dengan harapan. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi teknis maupun dari segi ilmiahnya yang semua itu disebabkan dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan Penulis. Oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Penulis agar bisa menjadi lebih baik. Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari banyak pihak yang memberikan kontribusi nyata yang sangat besar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala saran, bantuan, bimbingan dan dorongan semangat yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Mohammad Nasir, M.Si., Akt.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.

2. Ibu Dr. Hj. Zulaikha, M.Si, Akt., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan senantiasa sabar memberikan pengarahan, bimbingan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Drs. Sudarno M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dosen Wali Akuntansi Reguler II 2011, yang telah memberikan perhatian dan pengarahan akademik kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu dan mempermudah semua urusan yang penulis perlukan.
7. Orang tuaku yang sangat luar biasa, Ibu Ari Koes Andriani dan Bapak H. Darmadi, S.E., M.M., Terima kasih atas segala doa, pengorbanan, perhatian, kesabaran, dukungan, dan ridhonya yang selalu diberikan. Semoga bisa membuat bapak dan ibu bangga.
8. Adik-adikku Zahra Mahadriani Hakim Darmadi dan Zakya Fitri Hakim Darmadi yang sangat saya cintai dan saya banggakan.
9. Titi Sendari atas cinta, pengertian, perhatian, kesabaran, dan waktu serta dukungan yang diberikan selama ini.

10. Teman-teman mahasiswa program studi Akuntansi Reg. 2 angkatan 2011 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, Abhiyoga, Aditya, Hafidh, Hidayat, Vida, Brilina, Sony, Bernandhi, Fajar, Bagus, Anin, Ruroh, Rahma, Deva, Rusli, Warih, Minanti, Ratu, Dian, Ana, Destia yang selalu membantu dan memberikan inspirasi dan motivasi dalam segala hal.
11. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan dukungan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Semoga semua bantuan, bimbingan, doa, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada Penulis tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi pijakan bagi Penulis untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Semarang, 31 Juli 2013

Penulis,

(Iqbal Nul Hakim Darmadi)

NIM. 12030111150019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka” QS 13:11

“Semua selalu berakhir bahagia, dan jika kamu masih belum bahagia berarti ini bukan akhir”

“Jika kita rasa DIAM itu terbaik, seharusnya kita DIAM, namun seandainya DIAM kita bukanlah sesuatu yang bijak, berkatalah sehingga mereka DIAM”

“Kita bisa menunda, tapi waktu tidak” (Benjamin Franklin)

“Kau tidak akan pernah tahu apa hasil dari tindakanmu, tapi jika kau tidak melakukan apapun, tentu tidak akan ada hasilnya” (Gandhi)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Ibu, Bapak dan adik-adik serta Titi
atas cinta, kasih sayang, do'a dan
dukungannya selama ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Manajemen Pajak	11

2.1.2 Teori Agensi	15
2.1.3 Ukuran Perusahaan	15
2.1.4 Profitabilitas	16
2.1.5 Tingkat Hutang Perusahaan.....	18
2.1.6 Intensitas Aset Tetap Perusahaan	20
2.1.7 Intensitas Persediaan.....	22
2.1.8 Fasilitas Perpajakan	24
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Penelitian.....	31
2.4 Perumusan Hipotesis	32
2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif	32
2.4.2 Pengaruh Tingkat Hutang Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif.....	33
2.4.3 Pengaruh Profitabilitas Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif.....	34
2.4.4 Pengaruh Intensitas Aset Tetap Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif.....	35
2.4.5 Pengaruh Intensitas Persediaan perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif.....	36
2.4.6 Pengaruh Fasilitas Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif.....	37

BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	39
3.2 Populasi dan Sampel.....	44
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	45
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	45
3.5 Metode Analisis	46
3.5.1 Uji Kualitas Data	46
3.5.2 Statistik Deskriptif Variabel	46
3.5.3 Uji Regresi Berganda.....	47
3.5.3.1 Uji Asumsi Klasik	47
3.5.3.2 Uji Model Regresi	50
3.5.3.3 Uji Hipotesis	51
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	53
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	53
4.2 Statistik Deskriptif Sampel.....	54
4.3 Uji Asumsi Klasik	56
4.3.1 Uji Normalitas	57
4.3.2 Uji Multikolinieritas	60
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	62
4.3.4 Uji Autokorelasi	63
4.4 Uji Model Regresi.....	64
4.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)	64
4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	65

4.5 Uji Hipotesis	66
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian.....	67
4.6.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif.....	67
4.6.2 Pengaruh Tingkat Hutang Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif.....	68
4.6.3 Pengaruh Profitabilitas Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif.....	69
4.6.4 Pengaruh Intensitas Aset Tetap Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif.....	69
4.6.5 Pengaruh Intensitas Persediaan Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif.....	70
4.6.6 Pengaruh Pemberian Fasilitas Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif.....	71
BAB V PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Keterbatasan Penelitian	76
5.3 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4.1	Proses Pengambilan Sampel Perusahaan Manufaktur	53
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif Variabel.....	54
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif Variabel Dummy	54
Tabel 4.4	Uji Statistik Non-Parametrik <i>Kolmogorov Smirnov</i> tidak normal.....	58
Tabel 4.5	Uji Statistik Non-Parametrik <i>Kolmogorov Smirnov</i> normal.....	60
Tabel 4.6	Uji Multikolonieritas dengan Melihat Nilai <i>Tolerance</i> dan Nilai VIF.....	61
Tabel 4.7	Uji Multikolinieritas dengan Melihat Besar Korelasi Antar Variabel	61
Tabel 4.8	Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser	63
Tabel 4.9	Uji Statistik t	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	32
Gambar 4.1 Analisis Grafik Data Variabel Residual Tidak Normal	58
Gambar 4.2 Analisis Grafik Data Variabel Residual Normal.....	59
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Data Sampel Perusahaan.....	83
Lampiran B	Statistik Deskriptif.....	86
Lampiran C1	Uji Normalitas Data Tudak Normal	87
Lampiran C2	Uji Normalitas Data Normal.....	88
Lampiran D1	Uji Mulikolinearitas Dengan Melihat Nilai Tolerance Dan VIF	89
Lampiran D2	Uji Multikolinearitas Dengan Melihat Besar Korelasi Antar Variabel	90
Lampiran E	Uji Autokorelasi.....	91
Lampiran F	Uji Heteroskedastisitas	92
Lampiran G	Uji Model Regresi.....	93
Lampiran H	Uji Hipotesis	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya.

Perusahaan ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan.

Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang disebut wajib pajak. Wajib pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk prosentase (Supramono, 2010). Tarif

pajak badan yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (2) huruf a, huruf b, dan pasal (31E)

Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang tujuannya untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. Mangoting dalam Pratiwi (2013) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Perusahaan juga harus dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, tindakan ini sering juga disebut tindakan agresif dalam perpajakan. Definisi tindakan pajak agresif oleh Frank, Lynch dan Rego dalam Fatharani (2012) adalah tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat, yang dapat diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*. Hasil dari manajemen pajak adalah jumlah pajak yang riil yang dibayarkan oleh perusahaan yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan.

Ada beberapa cara supaya suatu perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya, yaitu dengan cara memaksimalkan *tax incentive*. Memanfaatkan ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan insentif pajak. Nicodème (2007) berpendapat bahwa perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan

kekurangan ahli dalam perpajakan. Ketika kegiatan manajemen pajak perusahaan tidak optimal akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapat *tax incentive* yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepada perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003) dan Richardson dan Lanis (2007) menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang berskala kecil. Porcano dalam Noor *et al.* (2010) menjelaskan bahwa perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak dan lobi politik. Tetapi ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa perusahaan yang berskala besar membayar pajak lebih besar daripada perusahaan berskala kecil, ini dikarenakan adanya *political cost* yang menyebabkan jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan besar menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya (Zimmerman, dalam Noor *et al.*, 2010). Karena adanya perbedaan hasil penelitian dan data yang terus mengalami pembaharuan, maka diperlukan penelitian untuk mengatasi permasalahan ini.

Selain dengan memanfaatkan ukuran perusahaan, perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh *Return On Assets* (ROA) untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenai pajak yang tinggi. Pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin

besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan (Richardson dan Lanis, 2007).

Penelitian lain menemukan bahwa besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya (Noor *et al.*, 2010). Dengan adanya perbedaan antara teori dan hasil penelitian yang ada, maka diperlukan penelitian untuk mengatasi permasalahan ini.

Intensitas kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap. Beban depresiasi yang timbul atas kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak (Blocher *et al.*, 2007). Dalam penelitian di Malaysia yang dilakukan oleh Noor *et al.* (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 10 ayat (6) menjelaskan bahwa persediaan barang dibagi menjadi 3 (tiga) golongan barang yaitu barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan bahan pembantu. Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 10 ayat (6) juga dijelaskan bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan dan penghitungan pemakaian persediaan untuk harga pokok hanya boleh dilakukan dengan metode rata-rata atau dengan metode *first-in first-out*. Penilaian persediaan yang diatur dalam perpajakan berbeda dengan yang diatur dalam PSAK No 14 (Revisi 2008). Gunadi (2009) menjelaskan bahwa persediaan dalam neraca dinyatakan sebesar harga pokok atau perolehannya. Persediaan juga dapat dinyatakan berdasarkan harga terendah antara harga pokok dan harga pasar dan harga jual (untuk produk tertentu). Adanya perbedaan antara penilaian persediaan menurut akuntansi dan pajak diperlukan adanya penyesuaian seperlunya untuk dapat diakui sebagai nilai persediaan (Gunadi, 2009).

Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan yang dapat mengurangi laba perusahaan. PSAK No 14 menjelaskan jumlah pemborosan (bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi), biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan terhadap persediaan akan mengurangi mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Penurunan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan disebabkan adanya hubungan linear antara laba perusahaan dengan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Penelitian tentang intensitas persediaan yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003), Richardson dan Lanis (2007), Noor *et al.* (2010), Chiou *et al.* (2012) menemukan bahwa intensitas persediaan berakibat pada bertambahnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Bertambahnya jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan dikarenakan tidak adanya faktor pengurang pajak dalam kepemilikan persediaan. Karena adanya perbedaan antara teori dan penelitian yang telah dilakukan, perlu dikaji lebih dalam pengaruh intensitas persediaan terhadap pajak yang dibayar oleh perusahaan.

Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Prabowo (2006) menjelaskan bahwa bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Dengan adanya bunga hutang perusahaan akan lebih memilih menggunakan hutang dalam pembiayaan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Haryadi (2012) menunjukkan bahwa hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurang pajak.

Pemerintah dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 memberikan fasilitas perpajakan kepada perseroan terbuka berupa pengurangan tarif sebesar 5%. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 pasal 2 menjelaskan syarat untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak adalah:

- (1)Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima

persen) lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang.

- (2) Penurunan Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) Pihak.
- (3) Masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Dengan adanya peraturan tentang fasilitas pengurangan tarif pajak akan menimbulkan adanya perbedaan dalam pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah fasilitas penurunan tarif pajak dapat berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan dengan melihat pajak yang riil dibayarkan oleh perusahaan.

1.2 Perumusan Masalah

Banyaknya perusahaan yang ingin menekan kewajiban perpajakannya menyebabkan adanya perbedaan antara perhitungan beban pajak yang ditetapkan dengan tarif pada undang-undang dan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Beberapa faktor yang dapat dimaksimalkan oleh perusahaan untuk kegiatan manajemen pajaknya antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat hutang perusahaan, intensitas kepemilikan aset tetap, intensitas kepemilikan persediaan dan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah.

Dari faktor-faktor yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja manajemen pajak perusahaan, maka rumusan masalah yang diungkap dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?
- b. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?
- c. Apakah tingkat hutang perusahaan hutang berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?
- d. Apakah intensitas kepemilikan aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?
- e. Apakah intensitas kepemilikan persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?
- f. Apakah fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan.
2. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh profitabilitas terhadap manajemen pajak perusahaan.

3. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh tingkat hutang perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan.
4. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh intensitas kepemilikan aset tak lancar terhadap manajemen pajak perusahaan.
5. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh intensitas kepemilikan persediaan terhadap manajemen pajak perusahaan
6. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak perusahaan

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam rangka manajemen pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak,
2. Bagi perusahaan agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen pajak agar tidak digolongkan dalam penyelundupan pajak,
3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur dan dapat membantu bagi penelitian yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi efektifitas manajemen pajak

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terarah serta lebih memudahkan dalam mengikuti pembahasan masalah dan isi penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang berupa uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, rumusan masalah, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang menguraikan tentang landasan teori penelitian, bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

Bab III berisi metode penelitian yang menguraikan tentang variabel-variabel dan metode-metode yang digunakan dalam penelitian, seperti penjelasan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

Bab IV berisi pemaparan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil penelitian.

Bab V berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk meminimalkan jumlah beban pajak. Manajemen pajak merupakan salah satu elemen dari manajemen perusahaan (Rusydi dan Kusumawati, 2010). Pengertian lain manajemen pajak yang dijelaskan Lumbantoruan dalam Suandy (2008) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak dalam pembahasan ini bukan merupakan penghindaran pajak yang ilegal atau dengan melanggar norma-norma dalam perpajakan yang telah tertulis dalam undang-undang yang dampaknya akan merugikan negara.

Suandy (2008) menjelaskan bahwa tujuan yang diharapkan dengan adanya manajemen pajak adalah:

1. Memenuhi kewajiban pajak yang merupakan kewajiban wajib pajak sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya

Suandy (2008) menjelaskan bahwa ada 3 fungsi manajemen pajak agar tujuan dalam manajemen pajak dapat terpenuhi, fungsi tersebut adalah:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)

Perencanaan pajak adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan manajemen pajak. Dalam perencanaan pajak, perusahaan mulai mengumpulkan dan menganalisis peraturan perpajakan agar dapat dipilih tindakan yang perlu dilakukan untuk menghemat beban pajak.

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan adalah implementasi dari hasil perencanaan pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Manajemen harus dapat memastikan implementasi dari rencana-rencana manajemen pajak telah dilaksanakan baik secara formal dan material. Manajemen juga harus memastikan bahwa pengimplementasian manajemen pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Jika dalam pengimplementasian terjadi pelanggaran peraturan perpajakan, maka praktik yang dilakukan perusahaan telah menyimpang dari tujuan awal manajemen pajak.

3. Pengendalian pajak (*tax control*)

Langkah terakhir dari manajemen pajak adalah melakukan pengendalian pajak. Pengendalian pajak adalah memeriksa pembayaran dalam hal ini waktu yang paling baik dalam melunasi kewajiban perpajakan dan jumlah yang dibayar oleh perusahaan. Memeriksa waktu pembayaran penting karena dapat menguntungkan perusahaan, membayar pajak pada saat terakhir lebih menguntungkan perusahaan dibanding dengan membayar

pajak lebih awal. Selain memeriksa waktu pembayaran yang baik untuk perusahaan, perusahaan juga harus memeriksa kembali jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan untuk melunasi kewajiban perpajakannya, apakah terjadi pemborosan atau tidak. Pemborosan dalam hal ini perusahaan membayar pajak lebih tinggi dari yang telah ditetapkan/yang terhutang.

Suandy (2008) menjelaskan bahwa motivasi adanya manajemen pajak tidak hanya berasal dari perusahaan yang ingin menekan beban pajaknya, tetapi juga ada motivasi yang berasal dari tiga unsur perpajakan itu sendiri. Motivasi itu adalah:

1. Kebijakan perpajakan

Dalam hal ini perusahaan harus dapat menganalisis transaksi yang dilakukan dan kewajiban yang melekat yang transaksi tersebut agar kewajiban yang melekat dalam transaksi tersebut tidak memberatkan perusahaan. Perusahaan juga harus dapat melindungi sumberdaya perusahaan dari pajak yang ada agar sumberdaya perusahaan tersebut bisa digunakan untuk tujuan lain. Objek pajak juga harus diperhatikan dalam manajemen pajak, hal ini dikarenakan objek pajak merupakan dasar dari penghitungan pajak yang tarifnya berbeda-beda untuk tiap objek pajaknya. Karenanya, perusahaan harus lebih teliti dalam menentukan objek pajak yang berhubungan dengan perusahaan agar pajak yang dibayarkan perusahaan tidak lebih (yang berarti pemborosan dana karena membayar

lebih tinggi) dan tidak kurang (agar terhindar dari sanksi yang akan menimbulkan pemborosan dana).

2. Undang-undang perpajakan

Perusahaan harus dapat menganalisis peraturan yang berlaku tentang perpajakan, karena adanya kemungkinan kesempatan untuk memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan pajak yang ada. Ini dikarenakan adanya peraturan-peraturan lain yang sengaja dibuat untuk membantu pelaksanaan peraturan dasar perpajakan tetapi dalam praktiknya peraturan bantuan yang dibuat bertentangan dengan peraturan dasar perpajakan. Adanya celah dari berbagai peraturan perpajakan yang ada harus dapat dimaksimalkan perusahaan agar tercapai manajemen pajak yang baik.

3. Administrasi perpajakan

Perusahaan dalam melakukan manajemen pajak juga harus memperhatikan sisi administrasi dalam bidang perpajakan, agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan terhindar dari sanksi yang akan memberatkan perusahaan akibat dari pelanggaran peraturan perpajakan.

Cara meneliti manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif didefinisikan oleh Richardson dan Lanis dalam Haryadi (2012) merupakan perbandingan antara pajak riil yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak. Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha manajemen pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaan. Karena apabila perusahaan memiliki persentase tarif

pajak efektif yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan maka perusahaan kurang maksimal dalam memaksimalkan insentif-insentif perpajakan yang ada, karena dengan perusahaan memanfaatkan insentif perpajakan yang ada maka dapat memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial (Haryadi, 2012).

2.1.2 Teori Agensi

Jensen dan Meckling dalam Masri dan Martani (2012) menjelaskan teori agensi adalah kontrak antara satu atau beberapa *principal* yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dalam pelaksanaan kontrak akan timbul biaya agensi (*agency cost*), yaitu biaya yang timbul agar manajer bertindak selaras dengan tujuan pemilik, seperti pembuatan kontrak ataupun melakukan pengawasan (Masri dan Martani, 2012). Timbulnya manajemen pajak sangat dipengaruhi oleh *agency problem*. Masri dan Martani (2012) menjelaskan masalah agensi yang muncul dengan adanya manajemen pajak adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara para pihak, satu sisi manajer sebagai *agent* menginginkan peningkatan kompensasi, pemegang saham ingin menekan biaya pajak.

2.1.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain (Suwito, dalam Atarwaman, 2011). Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar, untuk

perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan yang memiliki total aset jauh dibawah perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil. Dijelaskan oleh Machfoedz dalam Atarwaman (2011) penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total aset perusahaan. Ada dua cara penghitungan nilai kekayaan perusahaan menurut Sawir (2004) yaitu dengan melihat total aktiva atau total nilai perusahaan. Total aktiva adalah total nilai buku dari aktiva menurut catatan akuntansi dan total nilai perusahaan adalah total nilai pasar seluruh komponen struktur keuangan.

Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan manajemen pajak (Noor *et al.*, 2007). Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan biaya pajak perusahaan. Nicodème (2007) berpendapat bahwa perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Dengan banyaknya sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat diminimalisir oleh perusahaan.

2.1.4 Profitabilitas

Atarwaman (2011) menjelaskan bahwa profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk

mengetahui efektifitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki. Ghozali dan Chariri dalam Atarwaman (2011) menjelaskan laba akuntansi merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Pengertian pendapatan dalam akuntansi keuangan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu organisasi sebagai akibat dari penjualan barang dan atau jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu (Fuad, 2000). Selisih antara pendapatan yang diterima oleh perusahaan akan dikurangkan dengan biaya untuk melihat kinerja perusahaan, apakah mendapatkan laba atau merugi dari kegiatan usaha perusahaan.

Ketika perusahaan telah mengalami laba, maka dapat dikatakan bahwa manajemen telah bekerja dengan baik dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga pendapatan yang diterima oleh perusahaan lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pendapatan (Atarwaman, 2011). Pengukuran efektifitas pengelolaan sumberdaya perusahaan dengan pendapatan yang diterima atau yang sering disebut profitabilitas perusahaan dapat dilakukan dengan menghitung pendapatan yang dihasilkan dengan total aset yang ada dalam perusahaan. Mardiyanto (2009) menjelaskan bahwa dalam akuntansi dikenal beberapa rasio profitabilitas:

1. Rasio Margin laba (*profit margin – PM*)

Meningkatnya PM mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dari aktivitas penjualannya.

2. Rasio kemampuan dasar menghasilkan laba (*basic earning power ratio/ operating return on total aset (OROA)*)

Earning before interest and tax merupakan laba murni perusahaan yang belum dipengaruhi keputusan keuangan (utang) dan pajak.

3. Tingkat pengembalian atas total aktiva (*return on asset* - ROA)

Rasio *return on asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas operasi.

4. Rasio tingkat pengembalian atas total ekuitas (*return on equity* - ROE)

ROE (*return on equity*) merupakan alat ukur terakhir untuk mengukur profitabilitas perusahaan. ROE menggambarkan keberhasilan perusahaan menghasilkan laba untuk para pemegang saham.

Perusahaan yang menerima penghasilan atau mendapatkan laba dari kegiatan usahanya diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterima. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Besarnya pajak penghasilan ditentukan oleh penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan dalam tahun pajak. Semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan berpengaruh pada besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Richardson dan Lanis, 2007).

2.1.5 Tingkat Hutang perusahaan

Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi dimana hutang ini merupakan sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya (Munawir,

dalam Rahmawati, 2012). Sawir (2004) menjelaskan bahwa hutang adalah sumber dana yang menimbulkan beban tetap keuangan, yaitu bunga yang harus dibayar tanpa memperdulikan tingkat laba perusahaan. Manajemen perusahaan harus dapat mengatur hutang dalam perusahaan yang tujuannya agar menguntungkan dan menghindari kerugian akibat timbulnya hutang. Hutang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang (Munawir, dalam Rahmawati, 2012). Hutang jangka pendek adalah semua kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam kurung waktu maksimal satu tahun. Hutang jangka panjang adalah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

Masri dan Martani (2012) menjelaskan bahwa pemilihan utang dan modal sebagai sumber pendanaan merupakan keputusan penting yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Adanya biaya bunga pada hutang menjadi pertimbangan penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan oleh perusahaan (Masri dan Martani, 2012). Modigliani dan Miller dalam Masri dan Martani (2012) menjelaskan bahwa biaya bunga merupakan faktor pengurang pajak penghasilan sehingga dapat digunakan untuk menghemat pajak.

Hutang dalam perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rasio *leverage* atau tingkat hutang dalam perusahaan. Ada dua macam penghitungan rasio *leverage* menurut Sawir (2004) yaitu *leverage* keuangan berdasar nilai buku diukur dengan rasio nilai buku seluruh hutang (*debt* = D) terhadap total aktiva (TA) sementara *leverage* keuangan berdasarkan nilai pasar diukur dengan rasio nilai buku seluruh hutang terhadap total nilai pasar perusahaan (*total value* = V).

Pierce dan Robinson Jr (2008) menjelaskan bahwa total rasio hutang terhadap total aset diatas 0,5 biasanya dianggap aman untuk perusahaan pada industri yang stabil. Sawir (2004) menjelaskan bahwa dalam akuntansi, rasio hutang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Rasio hutang

Rasio hutang merupakan gambaran dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dibiayai oleh hutang.

2. Rasio pengganda hutang

Rasio ini menggambarkan bagaimana menghitung hutang dengan melihat perbandingan dari aset dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Ketika aset perusahaan tidak bertambah tetapi jumlah ekuitas menurun, maka dapat disimpulkan bahwa adanya penambahan hutang untuk menyeimbangkan antara kepemilikan aset yang ada dan ekuitas yang tersedia di perusahaan.

2.1.6 Intensitas Aset Tetap Perusahaan

Aset adalah kekayaan yang mempunyai manfaat ekonomi berupa benda berwujud maupun benda tak berwujud yang dapat dikuasai oleh yang berhak akibat transaksi (Nafarin, 2007). Aset juga dapat menggambarkan ukuran perusahaan karena jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan berbanding lurus dengan ukuran perusahaan (Machfoedz, 1994, dalam Atarwaman 2011).

Aset pada perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap (Nafarin, 2007). Aset lancar (*current asset*) adalah aset perusahaan yang dimiliki

oleh perusahaan dan mempunyai umur ekonomis paling lama satu tahun dalam siklus kegiatan perusahaan yang normal (Nafarin, 2007). Nafarin (2007) juga menjelaskan bahwa aset tetap (*fixed asset*) adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dalam siklus kegiatan yang normal. PSAK No. 16 Tahun 2007 menjelaskan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan untuk operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap yang dimanfaatkan perusahaan akan menyusut nilainya, ini dikarenakan sifat aus yang dimiliki oleh aset tetap. Untuk aset tetap yang tidak digunakan oleh perusahaan juga tetap akan menyusut karena sifat aset tetap yang dapat ketinggalan zaman (usang) (Nafarin, 2007). Nafarin (2007) membagi aset tetap menjadi tiga jenis, yaitu aset tetap berwujud, aset tetap tak berwujud dan aset tetap sumber daya alam. Istilah penyusutan untuk masing-masing aset tetap berbeda satu dengan yang lain, untuk penyusutan yang terjadi pada aset tetap berwujud disebut depresiasi, penyusutan terhadap aset tetap tak berwujud disebut amortisasi dan penyusutan aset tetap sumberdaya alam disebut deplesi (Nafarin, 2007). Dalam manajemen pajak, depresiasi dapat dijadikan sebagai pengurang beban pajak. Perusahaan dengan rasio aset tetap dibanding dengan total aset yang besar, akan membayar pajak lebih rendah dibanding perusahaan yang memiliki rasio lebih kecil (Blocher *et al*, 2007).

2.1.7 Intensitas Persediaan

Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu (Herjanto, 2007). Herjanto (2007) menjelaskan bahwa persediaan dibagi beberapa bentuk:

1. Persediaan bahan mentah

Persediaan bahan mentah biasa dijumpai pada perusahaan yang bergerak dalam bidang industri. Persediaan bahan mentah yang ada dalam perusahaan nantinya akan diolah menjadi persediaan bahan jadi yang mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi dari persediaan bahan mentah yang tujuannya untuk dijual oleh perusahaan sehingga perusahaan mendapatkan laba dari proses produksi.

2. Persediaan bahan pembantu

Persediaan pembantu adalah persediaan bahan yang memiliki kegunaan untuk membantu proses produksi.

3. Persediaan bahan dalam proses

Persediaan bahan dalam proses adalah persediaan yang membutuhkan proses lebih lanjut sehingga akan didapatkan persediaan bahan jadi yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi.

4. Persediaan barang jadi

Persediaan barang jadi merupakan hasil akhir dari proses produksi.

5. Persediaan suku cadang

Persediaan suku cadang adalah persediaan yang diperlukan agar proses produksi suatu perusahaan tidak terganggu, contoh persediaan suku cadang

antara lain rantai dan *gear* yang digunakan dalam mesin untuk kegiatan produksi.

Perusahaan tidak boleh terlalu banyak menyimpan persediaan karena persediaan hanyalah suatu sumber dana yang menganggur, karena sebelum persediaan digunakan maka sumber dana yang terikat didalamnya tidak dapat digunakan untuk keperluan yang lain (Herjanto, 2007). Investasi persediaan yang dilakukan oleh perusahaan dapat diukur dengan rasio perbandingan antara jumlah persediaan dengan total aset (Richardson dan Lanis, 2007). Rasio ini dapat digunakan untuk analisis apakah investasi perusahaan terhadap persediaan telah sesuai dengan kebutuhan atau malah terjadi pemborosan.

Beberapa fungsi dari persediaan menurut Herjanto (2007) antara lain:

1. Menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang diperlukan oleh perusahaan
2. Menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan
3. Menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga barang atau inflasi
4. Untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman sehingga persediaan tidak akan kesulitan jika bahan baku tidak tersedia di pasaran
5. Mendapatkan keuntungan dari pembelian berdasarkan diskon kuantitas
6. Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tersedianya barang yang diperlukan.

Perusahaan yang memiliki jumlah persediaan yang besar membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan yang ada. Herjanto (2007)

menjelaskan bahwa jumlah persediaan yang besar akan mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang besar, meningkatnya biaya penyimpanan, dan resiko kerusakan barang yang lebih besar. PSAK No. 14 menjelaskan bahwa biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan pada persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai biaya dalam periode terjadinya biaya. Dengan dikeluarkannya biaya tambahan dari persediaan dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya, maka dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan. Ketika perusahaan mengalami penurunan laba, maka perusahaan akan membayar pajak lebih rendah sesuai dengan laba yang diterima oleh perusahaan.

2.1.8 Fasilitas Perpajakan

Tarif pajak badan ditentukan oleh pemerintah sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2) yang berisi tarif pajak penghasilan wajib pajak badan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif pajak sebesar 25% merupakan *update* dari pasal 17 ayat (1) huruf b pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang berisi tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Penurunan tarif ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran membayar pajak dari wajib pajak badan karena tarif telah diturunkan sehingga tidak lagi terlalu membebani perusahaan.

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 terdapat fasilitas pengurangan tarif pajak badan untuk wajib pajak badan yang paling sedikit 40% (empat puluh

persen) dari jumlah keseluruhan sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Peraturan ini tercantum dalam pasal 17 ayat (2b) yang berisi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif PPh wajib pajak badan yang sedang berlaku.

Dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 didapat dua tarif pajak untuk wajib pajak badan, yaitu 25% (dua puluh lima persen) bagi perusahaan yang tidak dan/atau memperjual belikan sahamnya di bursa efek di Indonesia kurang dari 40% dari total saham yang ada, dan 20% (dua puluh persen) bagi perusahaan yang memperdagangkan minimal 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan sahamnya pada bursa efek di Indonesia. Dengan adanya perbedaan tarif pajak, maka akan mengakibatkan perbedaan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Derashid dan Zhang (2003) melakukan penelitian pada perusahaan di Malaysia mengenai tarif pajak efektif perusahaan. Dengan variabel dependen tarif pajak efektif. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah dampak perbedaan bisnis perusahaan, ukuran perusahaan, hutang perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, ROA, perbandingan nilai buku dan nilai pasar perusahaan, dan kepemilikan modal oleh pemerintah dan tahun pajak.

Penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa variabel ukuran perusahaan, hutang perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, perbandingan nilai buku dan nilai pasar perusahaan, dan ROA berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Perbedaan bisnis yang dijalankan berpengaruh negatif signifikan terhadap tarif pajak efektif, perusahaan dalam sektor manufaktur dan sektor perhotelan memiliki tarif pajak efektif lebih rendah daripada sektor lain. Untuk kepemilikan modal oleh pemerintah pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Penelitian pada perusahaan Australia yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) menggunakan variabel dependen berupa tarif pajak efektif. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, hutang finansial, intensitas aset tetap, intensitas persediaan dan intensitas penelitian dan pengembangan. Ada variabel kontrol dalam penelitian yang dilakukan Richardson dan Lanis (2007) yaitu ROA dan sektor bisnis perusahaan. Richardson dan Lanis (2007) menambahkan variabel khusus yaitu *tax reform variabel* yang menggunakan variabel dummy yaitu satu (1) untuk observasi yang dilakukan setelah *tax reform* dan nol (0) untuk yang lainnya. Hasil penelitian yang dilakukan Richardson dan Lanis (2007) adalah ukuran perusahaan, hutang finansial, intensitas aset tetap, intensitas penelitian dan pengembangan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Untuk variabel intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Adanya reformasi pajak, akan menyebabkan ukuran perusahaan, intensitas persediaan, ROA, dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Adanya reformasi pajak akan menyebabkan variabel hutang

finansial berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Reformasi pajak juga menyebabkan variabel intensitas penelitian dan pengembangan menjadi tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif

Dalam penelitian yang dilakukan Noor *et al.* (2010) pada perusahaan di Malaysia dengan menggunakan variabel dependen berupa tarif pajak efektif. Variabel independen yang digunakan Noor *et al.* yaitu ukuran perusahaan, *return on asset* (ROA), hutang perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, perbedaan bisnis perusahaan, perbedaan metode perpajakan dan perbedaan tahun pajak. Hasil penelitian yang didapat adalah bahwa ukuran perusahaan dan intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Untuk variabel ROA, hutang perusahaan dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Untuk jenis usaha perusahaan didapatkan hasil bahwa industri produk, perdagangan dan jasa, *consumer product*, pertanian, teknologi dan properti memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah dibanding sektor lain.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Chiou *et al.* (2012) yang dilakukan pada perusahaan di China dengan menggunakan variabel dependen berupa tarif pajak efektif dengan berbagai rumus dan variabel independen berupa hutang perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, ROA, ukuran perusahaan dan kepemilikan modal oleh pemerintah. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa kepemilikan saham oleh pemerintah dan intensitas kepemilikan aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Disisi lain, ukuran perusahaan, ROA dan intensitas persediaan memiliki pengaruh positif terhadap

tarif pajak efektif. Ada juga variabel independen yang berpengaruh negatif terhadap tarif pajak negatif, yaitu hutang perusahaan

Penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Haryadi (2012) menggunakan variabel dependen tarif pajak efektif dan variabel independen penelitian adalah intensitas aset tetap, hutang perusahaan dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan Haryadi (2012) menemukan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Variabel hutang perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, dan yang terakhir variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Penelitian lain yang dilakukan di Indonesia dilakukan oleh Fatharani (2012) menggunakan tiga jenis variabel, yaitu variabel dependen, variabel independen dan variabel kontrol. Variabel dependen pada penelitian ini adalah tindakan pajak agresif, untuk variabel independennya adalah karakteristik kepemilikan, reformasi pajak dan hubungan politik. Variabel terakhir adalah variabel kontrol yang mencakup ukuran perusahaan, pendanaan dan profitabilitas. Hasil penelitian ini adalah variabel karakteristik kepemilikan, hubungan politik, dan pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Variabel reformasi perpajakan, ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif.

Penelitian terdahulu dapat diringkas dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel yang Digunakan	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Derashid dan Zhang	Variabel independen: dampak perbedaan	Analisis Regresi	bahwa variabel ukuran perusahaan, hutang

	(2003)	<p>bisnis perusahaan, ukuran perusahaan, hutang perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, ROA, perbandingan nilai buku dan nilai pasar perusahaan, kepemilikan modal oleh pemerintah dan tahun pajak</p> <p>Variabel dependen: tarif pajak efektif</p>	Berganda	<p>perusahaan, intensitas aset tetap, perbandingan nilai buku dan nilai pasar perusahaan, dan ROA berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif</p> <p>intensitas persediaan dan perbandingan nilai buku dan nilai pasar perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif</p> <p>Perbedaan bisnis yang dijalankan berpengaruh negatif signifikan terhadap tarif pajak efektif, perusahaan dalam sektor manufaktur dan sektor perhotelan memiliki tarif pajak efektif lebih rendah daripada sektor lain</p> <p>kepemilikan modal oleh pemerintah pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif</p>
2	Richardson dan Lanis (2007)	<p>Variabel independen: ukuran perusahaan, hutang finansial, intensitas aset tetap, intensitas persediaan dan intensitas penelitian dan pengembangan, dan <i>tax reform</i></p> <p>Variabel dependen: tarif pajak efektif</p>	Analisis Regresi	<p>ukuran perusahaan, hutang finansial, intensitas aset tetap, intensitas penelitian dan pengembangan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif</p> <p>Untuk variabel intensitas persediaan berpengaruh positif</p>

		Variabel kontrol ROA dan sektor bisnis perusahaan		terhadap tarif pajak efektif.
3	Noor <i>et. al.</i> (2010)	Variabel independen: ukuran perusahaan, <i>return on asset</i> (ROA), hutang perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, perbedaan bisnis perusahaan, perbedaan metode perpajakan dan perbedaan tahun pajak Variabel dependen: tarif pajak efektif	Analisis Regresi Berganda	ukuran perusahaan dan intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif ROA, hutang perusahaan dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif Untuk jenis usaha perusahaan didapatkan hasil bahwa industri produk, perdagangan dan jasa, <i>consumer product</i> , pertanian, teknologi dan properti memiliki tarif pajak efektif yang rendah dibanding sektor lain
4	Chiou <i>et. al.</i> (2012)	Variabel independen: hutang perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, ROA ukuran perusahaan dan kepemilikan modal oleh pemerintah Variabel dependen: tarif pajak efektif	Analisis regresi logistik	Kepemilikan saham oleh pemerintah dan kepemilikan aset tetap tidak ada memiliki pengaruh dengan tarif pajak efektif Ukuran perusahaan, ROA dan dan intensitas persediaan pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif variabel independen hutang perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak

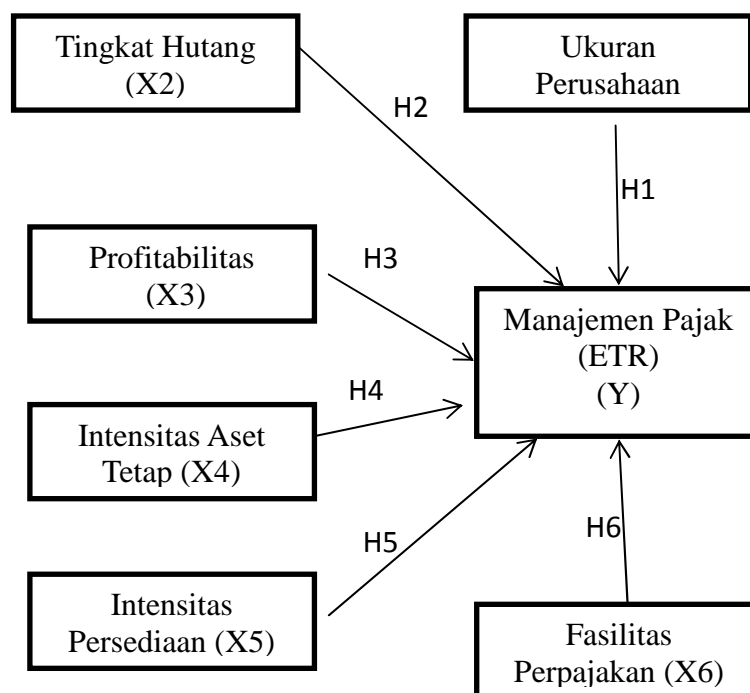
				efektif,
5	Teddy Haryadi (2012)	Variabel independen: pengaruh intensitas aset tetap, hutang perusahaan dan ukuran perusahaan Variabel dependen: tarif pajak efektif	Analisis regresi berganda	intensitas aset tetap dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif variabel hutang perusahaan akan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif
6	Nazhaira Fatharani (2012)	Variabel independen: karakteristik kepemilikan, reformasi pajak dan hubungan politik Variabel dependen: tindakan pajak agresif Variabel kontrol : ukuran perusahaan, pendanaan dan profitabilitas	Analisis regresi berganda	variabel karakteristik kepemilikan, hubungan politik, dan pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif variabel yang berpengaruh negatif adalah reformasi perpajakan, ROA dan ukuran perusahaan

2.3 Kerangka Penelitian

Perusahaan akan menggunakan manajemen pajak untuk menekan beban pajaknya agar tidak memberatkan keuangan perusahaan. Dengan adanya teori agensi, maka manajer sebagai *agent* berusaha untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan membuat beban pajak menjadi kecil sehingga manajer akan mendapat kompensasi kinerja yang maksimal. Perusahaan akan memanfaatkan

sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menekan beban pajak dan mengefektifkan manajemen pajaknya. Beberapa cara yang mungkin dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memanfaatkan ukuran perusahaannya, memanfaatkan tingkat hutang perusahaan, memanfaatkan profitabilitas perusahaan, memanfaatkan intensitas aset tetap dan intensitas persediaan serta adanya pemberian fasilitas perpajakan. Berdasarkan penjabaran di atas, maka disusun kerangka penelitian pada gambar 2.1

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan teori keagenan, sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan dapat

digunakan oleh manajer untuk memaksimalkan kompensasi kinerja manajer, yaitu dengan cara menekan biaya pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Penelitian Derashid dan Zhang (2003) menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang berskala kecil sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Porcano dalam Noor *et al.* (2010), ini disebabkan karena perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak dan lobi politik. Nicodème (2007) berpendapat bahwa perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Ketika kegiatan manajemen pajak perusahaan tidak optimal akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapat *tax incentive* yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepada perusahaan. Dari penjabaran diatas, dapat diambil hipotesis bahwa:

H1: ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif

2.4.2 Pengaruh Tingkat Hutang Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Berdasarkan teori keagenan, hutang dapat digunakan oleh manajer untuk menekan biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga hutang. Jika biaya bunga hutang dapat digunakan untuk menekan beban pajak, maka ada kemungkinan manajer memilih menggunakan hutang untuk pendanaan guna mendapatkan *benefit* berupa biaya bunga hutang. Biaya bunga hutang yang timbul akan digunakan sebagai pengurang pajak sehingga dapat meningkatkan laba

perusahaan. Ketika manajer dapat meningkatkan kinerja perusahaan, maka manajer akan mendapat keuntungan peningkatan kompensasi.

Biaya hutang yang timbul karena adanya hutang dapat menjadi faktor pengurang pajak. Prabowo (2006) menjelaskan bahwa bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003), dijelaskan bahwa hutang perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif yang menggambarkan bahwa hutang perusahaan dapat membantu mengurangi beban pajak perusahaan. Dari uraian diatas dapat diambil hipotesa kedua yaitu:

H2: hutang perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif

2.4.3 Pengaruh Profitabilitas Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Adanya teori agensi akan memacu para manajer untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka secara otomatis jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Manajer sebagai *agent* dalam agensi teori akan berusaha meminimalisir pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja manajer sebagai akibat dari tergerusnya laba perusahaan oleh beban pajak.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Undang-

Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dibebankan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Richardson dan Lanis (2007) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Roman dan Lanis (2007) profitabilitas digambarkan dengan ROA. Tingkat ROA perusahaan yang semakin tinggi menyebabkan tarif pajak efektif semakin tinggi, karena adanya dasar pengenaan pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh dan diterima oleh perusahaan. Dari uraian diatas didapat hipotesa ketiga yaitu:

H3: Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

2.4.4 Pengaruh Intensitas Aset Tetap Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan dapat mengurangi pajak karena adanya depresiasi yang melekat dalam aset tetap. Seperti yang dijelaskan oleh Blocher (2007) yaitu beban depresiasi memiliki pengaruh pajak dengan bertindak sebagai pengurang pajak.

Dalam teori agensi, depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk menekan jumlah beban pajak perusahaan. Manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan untuk berinvestasi dalam aset tetap, dengan tujuan untuk

mendapatkan keuntungan berupa depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Dengan memanfaatkan adanya depresiasi, manajer dapat meningkatkan kinerja perusahaan untuk tercapainya kompensasi kinerja manajer yang diinginkan. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan Derashid dan Zhang (2003), Richardson dan Lanis (2007) dan Noor *et al.* (2010) mendapatkan hasil bahwa variabel intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif sehingga variabel intensitas aset tetap berpengaruh positif manajemen pajak. Dengan adanya uraian diatas didapat hipotesa keempat yaitu:

H4: intensitas aset tetap perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif

2.4.5 Pengaruh Intensitas Persediaan perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Intensitas persediaan menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Besarnya Intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan antara lain adanya biaya penyimpanan dan biaya yang timbul akibat adanya kerusakan barang (Herjanto, 2007). PSAK No. 14 mengatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan dari dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar akan menyebabkan penurunan laba perusahaan.

Dalam agensi teori, manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Disisi lain,

manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung untuk menekan beban pajak. Cara yang akan digunakan manajer adalah dengan membebaskan biaya tambahan persediaan untuk menurunkan laba perusahaan sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan. Jika laba perusahaan mengecil, maka akan menyebabkan menurunnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Dari uraian diatas dapat diambil hipotesa kelima yaitu:

H5: Intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif

2.4.6 Pengaruh Pemberian Fasilitas Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Alm dalam Hutagaol *et al.* (2007) menjelaskan bahwa semakin kecil tarif pajak yang dibebankan kepada perusahaan, maka perusahaan akan semakin patuh terhadap peraturan perpajakan. Ketika jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan tidak lagi memberatkan perusahaan, maka perusahaan tidak perlu melakukan manajemen pajak untuk menekan beban pajaknya (Alm, dalam Hutagaol *et al.*, 2007). Alm dalam Hutagaol *et al.* (2007) menjelaskan bahwa manajemen pajak pada perusahaan yang dikenakan tarif pajak yang rendah akan cenderung menjaga agar perusahaan menaati peraturan perpajakan sehingga tidak dikenai sanksi terkait dengan pelanggaran peraturan perpajakan yang dapat merugikan perusahaan.

Dari sudut pandang teori keagenan, manajer akan berusaha lebih keras untuk menekan beban pajak ketika perusahaannya tidak mendapatkan fasilitas pengurang pajak. Manajer yang perusahaannya tidak mendapatkan fasilitas akan

semakin agresif dalam mencari celah dalam aturan-aturan perpajakan agar dapat menekan beban pajak. Dengan menekan beban pajak maka akan meningkatkan kinerja perusahaan demi tercapainya tujuan pribadi yaitu mendapatkan kompensasi yang besar. Dari uraian yang ada dapat diambil hipotesa keenam sebagai berikut.

H6 : Pemberian fasilitas perpajakan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, telah dirumuskan beberapa hipotesis, untuk mendukung hipotesis yang dibuat, maka diperlukan tujuh variabel. Yaitu enam variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2007). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan (X1), Tingkat Hutang (X2), Profitabilitas (X3), Intensitas Modal (X4), Intensitas Persediaan (X5), dan Fasilitas Perpajakan (X6). Variabel dependen dijelaskan oleh Sekaran (2007) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen pajak

Definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Manajemen Pajak

Definisi manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Manajemen pajak dalam penelitian ini menggunakan *proxy* tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Beban pajak dan laba sebelum pajak dalam penghitungan tarif pajak efektif merupakan beban pajak yang tercantum dalam laporan laba/rugi perusahaan. Beban pajak yang tercantum dalam laporan keuangan adalah total pajak kini ditambah dengan total pajak tangguhan.

2. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. penelitian ini menggunakan *proxy* total aset perusahaan untuk menentukan ukuran perusahaan. Untuk mengukur skala perusahaan dapat menggunakan rumus

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Aset}$$

Total aset yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan adalah total aset lancar dan aset tidak lancar yang dimiliki oleh perusahaan yang tercantum dalam neraca keuangan perusahaan.

3. Tingkat Hutang Perusahaan

Definisi hutang adalah salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan perusahaan untuk membiayai pengeluarannya. Rasio hutang digunakan untuk menggambarkan total aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Hutang dalam penelitian ini diproxy dengan rasio hutang perusahaan. Rasio hutang dapat dihitung dengan cara membandingkan nilai buku seluruh hutang (*debt* = *D*) dibagi dengan total aktiva. Berdasarkan

penjelasan diatas, maka pengukuran tingkat hutang perusahaan dapat diukur dengan cara:

$$\text{RASIO HUTANG} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

Total hutang yang digunakan untuk menghitung rasio hutang adalah total hutang perusahaan yang tertera dalam neraca baik hutang jangka pendek dan jangka panjang. Total aset yang digunakan adalah total aset perusahaan baik aset lancar maupun aset tidak lancar sesuai dengan yang tertera dalam neraca keuangan perusahaan.

4. Profitabilitas

Definisi profitabilitas adalah ukuran untuk menilai efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara modal yang digunakan dengan laba operasi yang dicapai. Penelitian ini menggunakan *proxy* rasio *return on aset (ROA)* untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Profitabilitas perusahaan dapat dihitung dengan cara:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Laba sebelum pajak yang digunakan dalam penghitungan rasio ROA adalah laba sebelum pajak yang tercantum dalam laporan laba/rugi perusahaan. Untuk total aset, digunakan total aset baik aset lancar maupun aset tidak lancar yang tercantum dalam neraca. Dasar penggunaan laba sebelum pajak yang digunakan untuk menghitung ROA adalah karena dengan menggunakan laba sebelum pajak, dapat diketahui kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas operasi tanpa terpengaruh keputusan investasi dan pajak.

5. **Intensitas Aset Tetap**

Definisi intensitas aset tetap adalah gambaran besarnya aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan *proxy* intensitas aset tetap untuk menggambarkan intensitas aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan dalam penelitian ini dapat dihitung dengan cara total aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan, atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{INTENSITAS ASET TETAP} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Total aset tetap adalah jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan yang tercantum dalam neraca mencakup tanah, bangunan dan peralatan. Total aset dalam penghitungan intensitas aset tetap menggunakan nilai total aset perusahaan yang tercantum dalam neraca perusahaan.

6. **Intensitas Persediaan**

Intensitas persediaan merupakan cerminan dari seberapa besar perusahaan berinvestasi terhadap persediaan yang ada dalam perusahaan. Variabel intensitas aset tetap menggunakan *proxy* rasio intensitas persediaan. Rasio intensitas persediaan dapat dihitung dengan cara nilai persediaan yang ada dalam perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Melalui penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa intensitas persediaan dapat diukur dengan cara:

$$\text{INTENSITAS PERSEDIAAN} = \frac{\text{PERSEDIAAN}}{\text{TOTAL ASET}}$$

Total aset dalam penghitungan intensitas persediaan menggunakan nilai total aset perusahaan yang tercantum dalam neraca perusahaan. Persediaan yang digunakan dalam penghitungan adalah persediaan yang tercantum dalam neraca

7. Fasilitas Perpajakan

Fasilitas perpajakan sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) bahwa perusahaan dengan kriteria tertentu akan mendapatkan fasilitas berupa penurunan tarif pajak sebesar 5%. Adanya fasilitas perpajakan berupa penurunan tarif akan berakibat pada menurunnya beban pajak perusahaan. Untuk menyiasati perbedaan tarif dasar pengenaan pajak pada perusahaan, maka perlu dipisahkan antara perusahaan yang mendapatkan fasilitas dan perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas penurunan pajak. Dengan pemisahan ini dapat dilihat kegiatan manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan dan yang tidak mendapatkan fasilitas penurunan tarif pajak. Variabel dummy digunakan sebagai *proxy* untuk pengukuran variabel fasilitas perpajakan. Nilai 1 (satu) diberikan kepada perusahaan yang mendapatkan fasilitas penurunan tarif dan nilai 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas penurunan tarif.

3.2 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian faktor yang mempengaruhi manajemen pajak adalah metode *purposive sampling*. Jogiyanto (2004) menjelaskan bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2011-2012.
2. Perusahaan yang mengalami laba selama dua tahun berturut-turut.

Kriteria ini digunakan karena pajak penghasilan dikenakan atas laba yang diperoleh perusahaan, sehingga ketika perusahaan merugi, perusahaan tidak dikenai pajak penghasilan

3. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dengan lengkap

Kelengkapan laporan keuangan sangat diperlukan dalam penilaian variabel-variabel penelitian, sehingga perusahaan yang tidak lengkap laporan keuangannya tidak termasuk dalam sampel penelitian.

4. Menggunakan mata uang rupiah dalam penilaian laporan keuangannya

Kriteria ini digunakan untuk pemilihan sampel karena sebagian besar perusahaan di Indonesia menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya. Perusahaan yang menggunakan mata uang dolar dalam

laporan keuangannya kurang mewakili keadaan perusahaan manufaktur di Indonesia.

5. Perusahaan yang beban pajak penghasilannya negatif

Perusahaan yang memiliki beban pajak penghasilannya negatif menggambarkan bahwa beban pajak penghasilan merupakan pengurang penghasilan. Oleh karena itu, perusahaan yang beban pajaknya positif tidak termasuk dalam sampel penelitian ini

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dibuat atau dikumpulkan oleh pihak luar (Sekaran, 2007). Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari pojok BEI Universitas Diponegoro.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka dan dokumentasi.

1. Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau jurnal di dalam perpustakaan dimana terdapat referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian.
2. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji dokumen-dokumen tentang data keuangan pada perusahaan manufaktur periode 2011-2012 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia

3.5 Metode Analisis

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk memproses variabel-variabel yang ada sehingga menghasilkan suatu hasil penelitian yang berguna dan memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.5.1 Uji Kualitas data

Uji kualitas data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti memiliki kualitas yang baik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas. Jika data yang telah dikumpulkan sudah memenuhi seluruh kriteria asumsi klasik, maka data yang ada termasuk dalam kategori data yang baik.

3.5.2 Statistik Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif menurut Ghazali (2011) digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai responden dalam penelitian ini, yang dilihat dari nilai jangkauan, minimum, maksimum, jumlah keseluruhan, rata-rata, standar deviasi, varian.

3.5.3 Uji Regresi Berganda

3.5.3.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Data yang baik adalah yang terdistribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat digunakan grafik normal P-P' Plot. Data tersebut normal atau tidak dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Jika data menyebar diatas garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafiknya histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas yang lain yang dapat digunakan adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*. *Level of significant* yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai *p-value* lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal, begitu pula sebaliknya

2. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2011) menjelaskan bahwa uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan antar

variabel independen dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Deteksi multikolinearitas pada suatu model dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain:

1. Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas.
2. Jika nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel independen kurang dari 0,70 maka model dapat dinyatakan bebas dari asumsi klasik multikolinearitas.

Jika nilai koefisien determinan, baik dilihat dari R^2 maupun *R-Square* di atas 0,60 namun tidak ada variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen maka ditengarai model terkena multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Cara mudah mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Mekanisme pengujian Durbin-Watson menurut Gujarati (2003, dalam Ghozali, 2011) adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis H_0 : tidak ada autokorelasi H_a : ada autokorelasi
2. Menentukan nilai d hitung (Durbin-Watson).

3. Untuk ukuran sampel tertentu dan banyaknya variabel independen, tentukan nilai batas independen (d_u) dan batas bawah (d_L) dari tabel.
4. Mengambil keputusan dengan kriteria, jika:
 - a. $d < d_L$, H_0 ditolak, berarti terdapat autokorelasi positif.
 - b. $d_L < d < d_u$, daerah tanpa keputusan (*grey area*), berarti uji tidak menghasilkan kesimpulan (*inconclusive*).
 - c. $d_u < d < 4 - d_u$, H_0 diterima, tidak ada korelasi.
 - d. $4 - d_u < d < 4 - d_L$, daerah tanpa keputusan (*grey area*), berarti uji tidak menghasilkan kesimpulan (*inconclusive*).
 - e. $d > 4 - d_L$, H_0 ditolak, berarti terdapat autokorelasi positif.

4. Uji Heteroskedastitas

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain, atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *Studentized Delete Residual* nilai tersebut (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan *variance residual* suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain, atau adanya hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *Studentized Delete Residual* nilai tersebut sehingga dapat dikatakan model tersebut homoskedastisitas. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *Scatterplot* model tersebut. Ghozali (2011) menjelaskan bahwa gambar *Scatterplot* menyatakan model regresi linier berganda tidak terdapat heteroskedastisitas jika:

- a. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- b. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- d. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.

3.5.3.2 Uji Model Regresi

1. Koefisien Regresi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai R^2 *adjusted* besarnya berkisar antara lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Jika semakin mendekati 1 maka model semakin baik karena apabila R^2 *adjusted* sama dengan 1 berarti variabel independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen

2. Uji Signifikansi simultan F-test

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

$$H_0: b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (HA) adalah tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol.

$$HA: b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Artinya, apakah semua variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. *Quick look*: jika nilai F lebih besar daripada 4 pada derajat kepercayaan 5%, maka H_0 ditolak atau HA diterima.
- b. Membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H_0 ditolak atau HA diterima.

3.5.3.3 Uji Hipotesis

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel lainnya konstan (Ghozali, 2011). Jika *p-value* lebih kecil dari *level of significant* yang ditentukan, atau t-hitung lebih besar dari t-tabel berarti variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan pengujian dua arah sebagai berikut:

1. Membandingkan antara variabel t tabel dan t hitung
 - a. Bila t hitung $>$ t tabel, maka H_0 ditolak atau variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

- b. Bila t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima atau variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.
2. Berdasarkan probabilitas Jika probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 0,05 (α) maka variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap efektifitas manajemen pajak dan sebaliknya jika lebih kecil dari 0,05 maka variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap efektifitas manajemen pajak.